

PERAN GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK DI SEKOLAH DASAR

Kristina Intani Bhughe

Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Maumere, Nusa Tenggara Timur, Indonesia
kristinaintanibhughe@gmail.com

Abstract

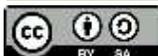
This study aims to determine the role of Pancasila and Citizenship Education teachers in shaping the character of the Inpres Hale Elementary School students, as well as the challenges and obstacles faced by Pancasila and Citizenship Education teachers in shaping the character of the Hale Inpres Elementary School students. This study used qualitative research methods. The survey respondents were the Principal of Inpres Hale Elementary School, Pancasila and Citizenship Education Teachers, Class VI guardians, parents, students and the community. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data analysis through data collection, data reduction, conclusion or verification. The results showed Pancasila and Citizenship Education teachers' role was to embody the value of positive attitudes towards students, such as being polite, and punctual, dressing according to school rules and providing guidance and advice. Non-compliance with school rules, tardiness and truancy, and the influence of school, family, and environmental factors.

Keywords: *the role of teachers, citizenship education, character building, students*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam membentuk karakter siswa di Sekolah Dasar Inpres Hale, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi guru PPKn dalam membentuk karakter Siswa Sekolah Dasar Inpres Hale. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Responden survei adalah Kepala Sekolah Dasar Inpres Hale, Guru PPKn, wali kelas VI, orang tua, peserta didik dan masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran guru PPKn adalah mewujudkan nilai sikap positif terhadap siswa, seperti bersikap sopan, tepat waktu, berpakaian sesuai aturan sekolah dan memberikan bimbingan dan nasehat. Tantangan dan hambatan yang dihadapi guru PPKn dalam membentuk karakter siswa sekolah dasar Inpres Hale adalah ketidakpatuhan terhadap peraturan sekolah, keterlambatan dan tindakan membolos, serta pengaruh faktor sekolah, keluarga, dan lingkungan.

Kata kunci: peran guru, PPKn, pembentukan karakter, peserta didik



PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menyebutkan bahwa pendidikan nasional berkaitan dengan pembentukan kehidupan bangsa dan pencapaian tujuan nasional. Pendidikan nasional tujuan mengembangkan potensi peserta didik untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi orang yang bertakwa, mengembangkan keterampilan dan menciptakan bangsa yang layak. Membentuk karakter dan peradaban akhlak mulia, kesehatan, pengetahuan, kompetensi, kreativitas, kemandirian, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (UU Sisdiknas). Undang-undang tersebut dengan jelas menyatakan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya menjadikan peserta didik arif secara akademis, tetapi juga memungkinkan mereka untuk mengembangkan generasi penerus yang berkarakter dan berkepribadian. Pengetahuan, kesadaran, atau persiapan, dan tindakan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila (Rachman, Nurgiansyah, & Kabatiah, 2021). Di sekolah, pelaksanaan pendidikan karakter harus mencakup semua komponen, dan baik warga sekolah, orang tua siswa, guru, dan pendidik harus terlibat dalam pendidikan karakter.

Guru harus mampu membuat siswa tertarik pada pelajaran. Guru merupakan salah satu komponen penting dalam proses pendidikan. Memang, proses pendidikan tanpa guru menghasilkan hasil yang kurang optimal. Setelah itu, proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan berkualitas dengan banyak pemangku kepentingan yang berbeda, terutama guru dan siswa, orang tua dan administrator pedagogis untuk dapat menciptakan efektivitas pengajaran yang tinggi. Salah satu peran guru tidak hanya sebagai petugas pengajar tetapi juga sebagai pendidik, dimana guru memberikan motivasi, pendidikan kepada siswa dari aspek nilai, etika dan sikap, hingga akhirnya membentuk kepribadian pendidikan siswa (Suprahatiningrum, 2017). Di satu sisi, guru sebagai pendidik memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengembangkan peserta didik dan membangun kepribadian, nilai budaya dan etika, yang merupakan tanggung jawab mewujudkan tujuan pendidikan warga negara (Latifah, 2017).

Peran guru di sekolah adalah untuk selalu memberikan contoh bagi siswanya jika mereka berpartisipasi dalam masyarakat dalam hidup mereka. Keberhasilan suatu pendidikan yang melibatkan lembaga pendidikan orang tua dan masyarakat secara merata dan membentuk proses pembelajaran bagi siswa yang sering melanggar nilai dan norma dapat dikendalikan oleh komponen-komponen yang berbeda tersebut. Peran guru sebagai orang tua pengganti di sekolah memiliki tanggung jawab yang besar, memberikan pembelajaran dan menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa. Dengan demikian, Guru dapat menjadi ayah kedua bagi siswa mereka di sekolah, membantu mereka merasa nyaman dan terbuka dengan guru mereka. Sehingga guru nantinya dapat menanamkan nilai individualitas pada siswa dan membimbing mereka ke arah yang lebih baik menuju menemukan kepribadian mulia mereka sendiri (Fauzi, Arianto, & Solihatin, 2013; Suprahatiningrum, 2017).

Untuk menjalankan perannya, guru dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (selanjutnya, PPKn) membutuhkan kompetensi yang cukup untuk membentuk karakter peserta didik. Guru PPKn harus memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab dan tepat. Untuk membentuk karakter siswa, guru harus mengembangkan keterampilan kepribadian (Dwintari et al., 2017).

Peran guru dalam PPKn harus mencakup beberapa kompetensi, seperti ketekunan dan kemampuan menjaga kepribadian seseorang tetap hidup (Bego, 2016). Selain itu, guru PKn harus memiliki nilai-nilai moral di antara majemuknya nilai-nilai moral siswa. Peran guru PPKn harus mengedepankan tiga aspek ilmu kewarganegaraan politik, hukum dan moral (Octavia & Sumanto, 2018). Berkaitan dengan moralitas guru sebagai panutan bagi siswa dalam disiplin waktu, disiplin berpakaian, dan perilaku disiplin lainnya.

Untuk membentuk karakter peserta didik, sekolah memerlukan wahana pendidikan dalam bentuk materi muatan dalam mata pelajaran untuk mengembangkan nilai, moral, sikap dan karakter Pancasilais peserta didik (Nurgiansah & Rachman, 2022). PPKn adalah suatu konsep pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik sebagai individu warga negara (Suardi, Herdiansyah, Ramlan, & Mutiara, 2019). PPKn membantu siswa mengembangkan pola pikir dan sikap kewarganegaraan yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Secara metodologis, PPKn sebagai wahana pedagogis bertujuan pengembangan kompetensi afektif, kognitif dan psikomotorik serta agar nilai-nilai Pancasila mendapat penekanan yang lebih proporsional secara substansial dalam pendidikan (Rachman et al., 2021). PPKn didorong untuk mengembangkan karakter peserta didik agar memiliki profil pelajar Pancasila (Rachman & Azam, 2021; Rachman et al., 2021).

Misi PKn mencerdaskan kehidupan bangsa, demokratis dan berakhlak mulia, senantiasa mendukung dan mengembangkan cita-cita demokrasi, serta membangun karakter bangsa (Azmi, 2016). Sementara visi PKn adalah mewujudkan proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan individu dan menjadi warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab (Azmi, 2016). PKn mempersiapkan warga negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan karakter positif masyarakat Indonesia. Ruang lingkup pengembangan materi muatan PKn adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika dengan tujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Rachman & Azam, 2021; Rachman et al., 2021).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan pendidikan karakter yang memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter seperti budi pekerti dan norm (Wahab & Sapriya, 2011; Winataputra, 2015). PPKn sebagai pendidikan karakter bertujuan untuk menciptakan warga memiliki berakhlak, berbudi pekerti luhur, bermoral dan taat kepada aturan agar nantinya anak memiliki kepribadian yang berkualitas sesuai dengan yang diharapkan. Pengembangan karakter pada peserta didik berdasarkan Pancasila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki pengertian bahwa sebagai seorang warga yang baik harus memiliki kesadaran sikap moral dan tingkah laku sebagaimana mestinya. Pencapaian pendidikan anak membutuhkan tanggung jawab bersama antara sekolah dan orang tua. Orang tua tidak dapat sepenuhnya memaksakan proses pendidikan pada anak-anaknya di sekolah. Oleh karena itu, dalam mengasuh anak, hubungan yang baik antara sekolah dan orang tua sangat diperlukan, dan anak dapat memperoleh perkembangan karakter yang kuat (Sihombing, Hutagalung, & Lukitoyo, 2021).

Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa melalui nilai, moral, norma dan etika yang ditanamkan sebagai bagian dari landasan filosofis dan kepribadian bangsa (Syamsiyatun & Wafiroh, 2013). Nilai dan norma dengan demikian menjadi pedoman pertama dan utama bagi individu atau kelompok orang dalam mengatur

perilaku. Kedua, kode etik yang merupakan kumpulan prinsip atau nilai moral, dan ketiga, filsafat moral, ilmu pembedaan yang benar dan yang salah. Pendidikan etika atau moral yang diajarkan pada anak adalah tanggung jawab bersama orang tua dan sekolah. Kerjasama antara pihak sekolah dan orangtua sangat dibutuhkan dalam perkembangan serta pembentukan karakter pada anak. Sehingga anak dapat memiliki karakter yang kuat dan baik (Ujiningsih & Antoro, 2010).

Guru memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan serta membantu pekerjaan peserta didik sehingga memiliki moral dan perilaku yang baik serta melindungi peserta didik dari hal yang dapat merusak kepribadiannya. Selain itu, peserta didik juga dibimbing dengan cara berkomunikasi sesuai dengan norma, moral dan etika yang berlaku di masyarakat. Amanah ini haruslah dipegang teguh dan dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah karena peserta didik merupakan tanggung jawab para pendidik untuk dapat mengarahkan mereka pada hal-hal kebaikan. Peran seorang guru PPKn membutuhkan kompetensi ganda, antara lain keuletan dan kemampuan menjaga eksistensi kepribadian (Bego, 2016; Rachman & Hijran, 2017). Selain itu, selain nilai moral siswa yang beragam, guru PPKn juga harus memiliki nilai dan moral.

Mengacu pada moralitas guru sebagai panutan bagi siswa mengenai disiplin waktu, disiplin berpakaian, dan perilaku disiplin lainnya (Octavia & Sumanto, 2018; Rachman & Hijran, 2017). Perilaku sikap siswa yang dicontohkan oleh guru sebagai aktor. Salah satunya mencerminkan nilai-nilai karakter bagi siswa. Padahal, pendidikan karakter yang diterapkan di Sekolah Dasar Inpres Hale (SD Inpres Hale) dirancang untuk memastikan guru PPKn sekolah menunjukkan perilaku jujur, hormat, dan toleran dengan tetap menerapkan nilai-nilai agama sesuai dengan ajaran dan keyakinan agama secara maksimal. Pengamatan awal menunjukkan bahwa pelanggaran tata tertib sekolah oleh siswa sering terjadi karena kurangnya kesadaran siswa terhadap peraturan sekolah, siswa sering terlambat ke sekolah, dan beberapa siswa mungkin terlambat ke sekolah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pihak sekolah. Selain proses pembelajaran di sekolah, beberapa siswa melakukan pelanggaran, atau membolos, yang biasa dilakukan oleh siswa, dan yang pada akhirnya menjadi mahir mengikuti peraturan sekolah. Oleh sebab itu, menarik sekali menelusuri lebih lanjut peran guru PPKn dalam pembentukan karakter peserta didik pada tingkat sekolah dasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di SD Inpres Hale, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini dilakukan selama sebulan dari tanggal 7 Maret hingga 7 April 2022 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang digunakan dalam meneliti objek yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci yang teknik pengumpulan datanya dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi (Prasanti, 2018). Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus dilakukan untuk menyelidiki fenomena tertentu yang ada di masyarakat dan untuk mengeksplorasi latar belakang, keadaan dan interaksinya secara rinci (Sugiyono, 2017).

Penggunaan metode penelitian tersebut menghasilkan data deskriptif berupa bahasa tulisan dan lisan manusia serta perilaku yang dapat diamati. Menurut Sugiyono (2017)

sumber data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder untuk pengumpulan data. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala SD Inpres Hale, Guru PPKn, dan orang tua, peserta didik kelas VI dijadikan sebagai subjek penelitian. Sumber sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung menyediakan data untuk pengumpulan data, misalnya melalui orang lain atau dokumen ini mudah ditemukan. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder adalah dokumen internet, artikel, jurnal, dan website yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Pengumpulan data penelitian dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, inferensi atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SD Inpres Hale adalah sebuah sekolah dasar yang terletak di Hale, Kecamatan Mapitala Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. SD Inpres Hale disponsori oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SD Inpres Hale didirikan pada tanggal 1 Juli 1984 dan dibangun di atas tanah seluas 1.610 m. SD Inpres Hale Hale memiliki infrastruktur yang meliputi enam ruang kelas. Ruangan lain yang berdekatan terdiri dari ruang kepala sekolah dan ruang staf Perpustakaan. KBM di SD Inpres Hale dari hari Senin sampai Sabtu dimulai pada pukul 07.30 pagi dan berakhir pada pukul 12.00. SD Inpres Hale memiliki 10 guru, 3 guru, 1 administrator sekolah, dan 1 satpam. Pada tahun 2021/2022, SD Inpres Hale memiliki 96 siswa aktif: 16 siswa Kelas I, 16 Kelas II, 14 Kelas III, 18 Kelas IV dan 16 siswa Kelas VI, sebanyak 16 siswa di kelas VI. SD Inpres Hale berlokasi di Desa Hale, RT/RW 006/003, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Negara Indonesia. Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Misi sekolah adalah mengajarkan kepercayaan dan keyakinan melalui pengajaran agama Katolik. Menumbuhkan semangat belajar yang positif, kreatif, efektif dan menyenangkan, menumbuhkan nilai-nilai spiritual dan moral siswa, memberikan contoh yang baik bagi siswa, dan menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman sebagai tempat belajar.

Peran Guru PPKn dalam Pembentukan Karakter Siswa di SD Inpres Hale

Peran guru dalam pengembangan karakter adalah menjadi panutan bagi siswa untuk diteladani, dan guru harus mendidik siswa tentang disiplin kehidupan sehari-hari (Cahyani & Dewi, 2021). Peran guru dalam pengembangan karakter siswa SD Inpres Hale dapat dilihat dalam beberapa upaya guru dalam pengembangan karakter. Pertama, peran guru dalam mengimplementasikan nilai sikap positif terhadap siswa

1) Bersikap Sopan

Sopan santun merupakan sikap tata krama dalam kehidupan sehari-hari sebagai cerminan kepribadian serta budi pekerti yang luhur (Rachman, 2015; Zuriah & Yustianti, 2007). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Gerakan Pembudayaan Karakter di Sekolah menyebutkan bahwa pengembangan karakter sopan dalam bertutur, bertindak, dan berperilaku harus dikedepankan di Sekolah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, SD Inpres Hale mewajibkan semua warga sekolah guru, staf dan siswa untuk menggunakan bahasa yang sopan di lingkungan sekolah, sikap dan bahasa yang sopan bicara. Guru PPKn memberikan contoh kepada siswanya dengan berperilaku dan

berbicara sopan kepada orang yang lebih tua dan teman sebaya. Jika siswa ketahuan menggunakan bahasa kasar atau berbicara tidak sopan kepada guru atau teman sebaya, Guru PPKn biasanya menegur dan menasehati siswa tersebut. Guru PPKn selalu bersikap sopan untuk membantu siswanya tumbuh menjadi manusia yang lebih baik.

2) Tiba di Sekolah Tepat Waktu

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Gerakan Pembudayaan Karakter di Sekolah menyebutkan bahwa guru dan tenaga kependidikan datang lebih awal untuk menyambut siswa sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Berdasarkan Permendikbud No. 21 Tahun 2015 tersebut, SD Inpres Hale telah mengeluarkan Kode Etik Sekolah yang menyatakan bahwa semua warga sekolah, guru, staf dan siswa harus datang ke sekolah tepat waktu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Guru PPKn selalu datang ke sekolah tepat waktu dan mencontohkan dengan datang ke sekolah pada pagi hari, datang ke sekolah pada pukul 06.00 dan tiba di lingkungan sekolah pada pukul 06.30, kegiatan KBM dimulai pada pukul 07.30 untuk memastikan guru PPKn tidak terlambat. Jika Anda menangkap seorang siswa yang datang terlambat ke sekolah, mereka biasanya dihukum. Guru juga menegur dan memberi peringatan kepada siswa agar lebih disiplin. Selain itu, siswa juga diajarkan agar berlatih disiplin dan mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah.

3) Berpakaian Sesuai Peraturan Sekolah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Gerakan Pembudayaan Karakter di Sekolah mengharuskan warga sekolah berpakaian sopan sesuai dengan norma nasional dan peraturan budaya/daerah. Dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan di atas, SD Inpres Hale mewajibkan seluruh warga sekolah, termasuk guru, staf dan siswa, untuk berpakaian sopan dan rapi sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah. Termasuk Guru PPKn selalu berpakaian rapi sesuai dengan tata tertib sekolah.

Kedua, memberikan bimbingan dan nasehat. Peran guru sangat penting untuk membawa sikap, watak, dan budi pekerti yang baik kepada siswa. Oleh karena itu bimbingan guru sangat diperlukan karena kehadiran guru di sekolah bertujuan untuk membimbing siswa agar tidak mengalami kesulitan dalam mengaturnya. Seorang guru PPKn yang memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa. Metode yang digunakan adalah konseling, pembentukan kelompok, dalam hal ini saling penilaian antar siswa terhadap perilaku, bahasa dan evaluasi guru terhadap siswa, biasanya pada saat pembagian laporan. Guru berpesan agar siswa rajin, tertib dan disiplin, dengan tujuan agar mereka selalu mengikuti dan termotivasi untuk mengikuti semua peraturan sekolah. Siswa yang berperilaku baik biasanya dipuji atau dikagumi lebih khusus karena sikapnya, sedangkan siswa yang baik dimotivasi atau diilhami dalam bentuk alat belajar, tulisan, dan uang untuk belajar lebih aktif.

Guru PPKn memberikan pembinaan khusus kepada siswa dan guru yang bekerja sama dengan orang tua siswa (dalam hal ini dewan sekolah) untuk membentuk karakter siswa di SD Inpres Hale agar anak-anak Bersama kita membimbing dan menasehati anak-anak kita agar mereka dapat mengambil tindakan yang lebih baik dan menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan. Karakter yang lebih baik. Untuk membentuk karakter siswa di SD Inpres Hale, guru PPKn memberikan bimbingan khusus kepada siswa dan guru yang bekerja sama dengan orang tua siswa (dalam hal ini dewan sekolah)

untuk saling membimbing dan menasehati anak. Memberikan bimbingan. Berperilaku lebih baik dan memiliki karakter yang lebih baik di masa depan.

Peran guru dalam mencontohkan dan memberi keteladanan merupakan metode influentif yang efektifitasnya paling signifikan (Rachman & Hijran, 2017). Peran guru dalam memberikan keteladanan untuk merupakan metode yang paling berdampak untuk membentuk karakter peserta didik (Ulwan, 1993). Mencontohkan dan memberikan keteladanan dalam pendidikan harus disadari dan diperhatikan dengan menunjukkan perkembangan yang positif untuk mengembangkan karakter (Rachman & Hijran, 2017; Schaefer, 1994). Menumbuhkan tanggung jawab seorang siswa untuk mengembangkan karakter, guru PPKn harus senantiasa mengembangkan rasa tanggung jawab pada diri siswa melalui interaksi langsung serta menasehatkan. Terutama tanggung jawab mengerjakan tugas sekolah yang sudah diberikan kepadanya untuk mengembangkan karakter sopan, disiplin, dan menjalani tata tertib sekolah (Aswar, 2018; Lickona, 2012). Peran guru PPKn menjadi strategis dalam pengembangan diri anak utamanya dalam memberikan berbagai pengetahuan dan keterampilan serta membentuk kepribadian (Brema, Ginting, Ivanna, & Nababan, 2021).

Tantangan dan Hambatan Guru PPKn dalam Membentuk Karakter Siswa di SD Inpres Hale

Tantangan dan kendala yang dihadapi guru PPKn dalam membentuk karakter siswa SD Inpres Hale yaitu: Pertama, tidak mematuhi peraturan sekolah:

1) Terlambat Masuk Sekolah

Disiplin merupakan suatu tindakan yang mendukung oleh kesadaran untuk menunaikan tugas kewajiban serta sebagaimana mestinya menurut aturan-aturannya atau tata kelakuan yang seharusnya berlaku di dalam suatu lingkungan tertentu (Hidayatullah, 2010). Disiplin adalah titik masuk bagi pendidikan karakter bagi sekolah karena jika tidak ada rasa hormat terhadap aturan, otoritas dan hak orang lain maka tidak ada lingkungan yang baik bagi pengajaran dan pembelajaran (Lickona, 2013). Disiplin adalah hal utama yang harus diperhatikan dalam membentuk karakter siswa dalam kaitannya dengan disiplin waktu. Sebagian besar siswa kelas VI tidak mengikuti aturan dan beberapa siswa terlambat ke sekolah atau terlambat bangun untuk bermain karena perjalanan jauh dari rumah ke sekolah.

Gambar 1. Guru PPKn Memberikan Teguran dan Menasehati Peserta Didik



Guru PPKn memberikan peringatan dan nasehat kepada siswa yang terlambat ke sekolah dan memotivasi mereka untuk datang lebih awal sesuai waktu yang telah ditentukan. Ketika perilaku terlambat ke sekolah terulang, guru PPKn mengambil

sikap tegas bahwa mereka dapat menjatuhkan sanksi pendidikan dan menyebarkan pengetahuan dalam bentuk pekerjaan rumah manual dalam jumlah besar. Menyimpulkan bahwa guru PPKn melakukan tugasnya dengan membimbing siswa untuk menjadi akrab dengan disiplin.

2) Tindakan Membolos

Ketidakhadiran bertentangan dengan peraturan sekolah. Sekolah biasanya mengambil sikap tegas terhadap siswa yang bolos sekolah atau bolos kelas selama jam sekolah. Kebanyakan siswa kelas VI mengabaikan aturan. Kepala sekolah mengeluarkan peraturan sekolah dan semua warga sekolah, guru, staf dan siswa wajib hadir di sekolah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan sekolah. Guru mata pelajaran akan memberikan sanksi jika terdeteksi membolos di kelas, dan guru agama atau guru PPKn akan memberlakukan hal yang sama jika peserta didik ketahuan membolos pada jam sekolah. Menghukum siswa yang bolos dengan memberikan Sanksi untuk menyiram bunga atau memberikan tugas kepada siswa di lingkungan sekolah. Dia menyimpulkan bahwa membolos tidak dibenarkan di lingkungan sekolah, sekolah perlu menegakkan aturan dan peraturan di sekolah, dan guru PPKn dapat menjatuhkan sanksi dan membentuk kepribadian siswa untuk mencegah perilaku buruk mereka.

Gambar 2. Guru PPKn Memberikan Sanksi



Pengaruh Faktor Lingkungan Sekolah, Keluarga dan Masyarakat

Dalam proses pembentukan kepribadian siswa ditemukan hambatan dan tantangan dalam mengembangkan kepribadian siswa, termasuk faktor lingkungan. Lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap kepribadian siswa melalui situasi sosial dan interaksi sehari-hari. Hale Impress, guru PPKn SD Inpres Hale, menjelaskan bahwa lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat berperan penting dalam mempengaruhi sikap peserta didik.

Adapun ketiga faktor yang mempengaruhi perubahan karakter peserta didik. Pertama, faktor lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan pilar yang utama pada perkembangan anak usia dini dalam membentuk baik buruknya pribadi manusia agar berkembang baik dalam beretika, moral dan akhlaknya. Peran keluarga dalam membentuk pola sikap pribadi seorang anak yang menentukan proses pendidikan yang diperoleh anak, tidak hanya dalam sekolah melainkan pada semua faktor yang bisa dijadikan sumber pendidikan bagi anak (Mutmainnah, 2019).

Melalui interaksi sosial dalam keluarga, anak menjadi sadar akan pola sikap, perilaku, keyakinan, cita-cita dan nilai-nilai dalam masyarakat sebagai bagian dari pengembangan karakter (Kurniawan, 2013). Lingkungan rumah harus mampu mempersiapkan dan memberikan pendidikan anak-anak agar menjadi generasi penerus yang baik. , perubahan dengan kurangnya perhatian orang tua. Beberapa orang tua acuh terhadap perkembangan anaknya karena pekerjaan, hubungan ibu-anak yang rapuh, banyak perbedaan pendapat, dan jarak anak dari orang tua. Orang tua melepaskan tanggung jawab mengasuh anak dan jarang memiliki waktu luang seminggu atau sebulan. Masalah bagi orang tua terhadap anak, oleh karena itu, adalah menanamkan nilai-nilai karakter yang baik sejak dini agar kelak anak tidak terkungkung atau terpengaruh oleh lingkungan di luar rumah. Pengembangan pribadi, serta pola asuh hubungan komunikatif dalam keluarga, menunjukkan bahwa lingkungan keluarga memainkan peran penting dalam pengembangan pendidikan inklusif dan berkelanjutan.

Kedua, Lingkungan Sekolah. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan karakter siswa adalah lingkungan sekolah. Pengembangan karakter di lingkungan sekolah sangat penting karena anak memiliki waktu yang cukup untuk bersama teman-teman sekolahnya baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Berdasarkan hasil penelitian Kami telah mengeluarkan kode etik peraturan tata tertib sekolah yang harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Kepala sekolah memberikan tanggung jawab kepada Guru PPKn untuk menerapkan nilai-nilai sikap positif terhadap peserta didik seperti sopan dan tepat waktu Tiba di sekolah, berpakaian sesuai aturan sekolah, dan memberikan bimbingan dan nasihat (Bego, 2016; Sihombing et al., 2021). Guru mata pelajaran PPKn di SD Inpres Hale menunjukkan bahwa meskipun lingkungan rumah dan masyarakat berperan sangat penting dalam mempengaruhi sikap siswa, dia melakukan yang terbaik di lingkungan sekolah sambil mengikuti aturan sekolah tetapi masih saja ada peserta didik yang tidak mematuhi aturan sekolah.

Gambar 3. Surat SK Tata Tertib SD Inpres Hale



Ketiga, lingkungan masyarakat. Masyarakat adalah tempat di mana anak-anak tumbuh dan berinteraksi dengan anak-anak lain, teman sebaya dan orang dewasa. Namun dengan demikian adapun beberapa faktor yang akan berpengaruh pada perkembangan anak diantaranya: teman sebaya; *culture* atau budaya yang ada di masyarakat itu sendiri; dan media massa (Hendri, 2020; Lickona, 2012, 2013). Banyak orang tua saat ini yang

acuh terhadap perkembangan anaknya, sehingga seringkali mengandalkan sekolah sebagai sarana pembentukan kepribadian anaknya, dan lingkungan.

SIMPULAN

Peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menunjukkan perilaku mentransformasikan nilai-nilai sikap yang baik kepada peserta didik seperti bersikap bertutur kata sopan, masuk sekolah tepat waktu, berpakaian sesuai aturan sekolah dan Memberikan bimbingan dan Menasehati. Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh guru PPKn dalam pembentukan karakter peserta didik di SD Inpres Hale yaitu tidak mematuhi aturan sekolah, keterlambatan datang ke sekolah, tindakan membolos, pengaruh faktor sekolah, keluarga dan lingkungan masyarakat. Solusi yang digunakan dalam pembentukan karakter peserta didik.

Selanjutnya peneliti memberikan beberapa rekomendasi, yang pertama kepada Pihak sekolah sebaiknya Kepala sekolah bersama guru memberikan penerapan pendidikan karakter kepada peserta didik dalam rangka pembentukan nilai-nilai karakter sikap kedisiplinan bagi peserta didik. Yang kedua, kepada orang tua peserta didik harapkan untuk melakukan pengawasan control, memberikan pembinaan, mendidik terhadap anak-anaknya untuk menanamkan nilai-nilai karakter terhadap peserta didik agar dapat melakukan perubahan terutama kedisiplinan terhadap pendidikan. Ketiga kepada peserta didik yang Pertama, diharapkan peserta didik lebih berusaha mematuhi aturan tata tertib sekolah demi menciptakan kedisiplinan, membentuk anak untuk membentuk karakter yang baik bagi peserta didik. Kedua, peserta didik lebih terbuka terhadap nasehat yang diberikan para guru karena semua masukan dan nasehat yang diberikan semata-mata untuk kebaikan dan masa depan mereka sendiri. Keempat, kepada peneliti selanjutnya sebaiknya peneliti dapat menindaklanjuti dengan berbagai riset di lapangan dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Erwin Prasetyo, S.T., M.Pd. selaku Rektor IKIP Muhammadiyah Maumere, Bapak Nurdin H. ABD. Rahman, S.E, M.M selaku Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial dan Humaniora, Bapak Abdul Muis Kasim, S.Sos., M.P selaku Ketua Program Studi PPKn sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan motivasi dan waktunya kepada penulis. Bapak DRS. Gabriel Gleko, M.Pd selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan berupa kritik dan saran hingga penyelesaian skripsi, Bapak Gisela Nuwa, S.Fil., M.Th. selaku Dosen Penguji I yang selalu memberikan bimbingan dan masukan, Bapak Antonius M.K. Naro, M.Ed selaku Dosen Penguji II, Ibu Inosensia Da Bura., S.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Inpres Hale, Bapak Yosep Termi Jedis Iry., S.Pd selaku Guru PPKn dan untuk semua pihak yang telah berperan aktif dalam penulisan skripsi mengenai peran guru PPKn dalam pembentukan karakter peserta didik Sekolah Dasar Inpres Hale kelas VI sehingga dapat dituangkan dalam bentuk tulisan dan dapat bermanfaat bagi pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswar, A. (2018). Peran Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab Siswa SMP Negeri 1 Sarjo. *EDU CIVIC*, 6(02), 12–24.
- Azmi, S. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan Merupakan Salah Satu Pengejawantahan Dimensi Manusia Sebagai Makhluk Individu, Sosial, Susila, dan Makhluk Religi. *Likhitaprajna*, 18(1), 77–86.
- Bego, K. C. (2016). Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Siswa dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Siswa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 5(3), 235–240. <https://doi.org/10.33366/JISIP.V5I3.306>
- Brema, D., Ginting, S., Ivanna, J., & Nababan, R. (2021). Perilaku Kewargaan Organisasi Bagi Guru Untuk Meningkatkan Kinerja Profesi Keguruan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 18(1), 1–18. <https://doi.org/10.24114/JK.V18I1.21395>
- Cahyani, K., & Dewi, D. A. (2021). Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik agar Menciptakan Siswa yang Berkualitas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 268–281. <https://doi.org/10.23887/JPKU.V9I2.34131>
- Dwintari, J. W., Kepribadian, K., Dalam, G., Pendidikan, P., Berbasis, K., Pendidikan, P., ... Karakter, P. (2017). Kompetensi Kepribadian Guru dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Penguatan Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 51–57. <https://doi.org/10.20527/KEWARGANEGARAAN.V7I2.4271>
- Fauzi, F. Y., Arianto, I., & Solihatin, E. (2013). Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Upaya Pembentukan Karakter Peserta Didik. *Jurnal PPKn UNJ Online*, 1(2), 1–15.
- Hendri. (2020). Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Pendidikan Pesantren dalam Membentuk Keadaban Moral Santri. *Jurnal Kewarganegaraan*, 17(1), 35–49. <https://doi.org/10.24114/jk.v17i1.18702>
- Hidayatullah, M. F. (2010). *Pendidikan Karakter Membangun Peradaban Bangsa*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Kurniawan, S. (2013). *Pendidikan Karakter; Konsepsi & Implementasi Secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, & Masyarakat*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Latifah, H. (2017). *Profesi Keguruan Menjadi Guru Profesional*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Lickona, T. (2012). *Mendidik Untuk Membentuk Karakter: Bagaimana Sekolah Dapat Memberikan Pendidikan tentang Sikap Hormat dan Tanggung Jawab* (J. A. Wamaungo, Penerj.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Lickona, T. (2013). *Pendidikan Karakter: Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar dan Baik*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

- Mutmainnah. (2019). Lingkungan dan Perkembangan Anak Usia Dini Dilihat Dari Perspektif Psikologi. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(2), 15–32. <https://doi.org/10.22373/EQUALITY.V5I2.5586>
- Nurgiansah, T. H., & Rachman, F. (2022). Nasionalisme Warga Muda Era Globalisasi: Pendidikan Kewarganegaraan di Perbatasan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 19(1), 66–75. <https://doi.org/10.24114/jk.v19i1.33214>
- Octavia, E., & Sumanto, I. (2018). Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Disiplin Siswa di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 20–30. <https://doi.org/10.31571/PKN.V2I2.955>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Gerakan Pembudayaan Karakter di Sekolah.
- Prasanti, D. (2018). Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 15–22. <https://doi.org/10.30656/lontar.v6i1.645>
- Rachman, F. (2015). *Implementasi Pendidikan Karakter Pada Organisasi Mahasiswa Eksternal Kampus (Studi Kasus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Deli Serdang)*. Undergraduate Thesis.
- Rachman, F., & Azam, Q. (2021). Pembelajaran Jarak Jauh Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Moral and Civic Education*, 5(1), 42–55. <https://doi.org/10.24036/8851412512021536>
- Rachman, F., & Hijran, M. (2017). Kajian Keteladanan Dalam Memperkuat Pendidikan Indonesia. *The 5th University Research Colloquium: Cinta Negeriku*, 998–1003. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Rachman, F., Nurgiansyah, T. H., & Kabatiah, M. (2021). Profilisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2970–2984. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.1052>
- Schaefer, C. (1994). *Bagaimana Mempengaruhi Anak*. Semarang: Dahara Prize.
- Sihombing, R. A., Hutagalung, J. F., & Lukitoyo, P. S. (2021). Pemahaman dan Pembinaan Norma Sopan Santun Melalui PPKn Pada Anak Sekolah GBI Sukma Medan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 18(1), 37–55. <https://doi.org/10.24114/JK.V18I1.20869>
- Suardi, Herdiansyah, Ramlan, H., & Mutiara, I. A. (2019). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Jaya Negara Makassar. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 4(1), 22–29. <https://doi.org/10.26618/JED.V4I1.1983>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suprahatiningrum, J. (2017). *Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi & Kompetensi Guru*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Syamsiyatun, S., & Wafiroh, N. (2013). *Filsafat, Etika, dan Kearifan Lokal untuk Konstruksi Moral Kebangsaan*. Ganeva: Globethics.net.

- Ujiningsih, & Antoro, S. D. (2010). Pembudayaan Sikap Sopan Santun di Rumah dan di Sekolah Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Karakter Siswa. *Temu Ilmiah Nasional Guru II: Membangun Profesionalitas Insan Pendidikan Yang Berkarakter dan Berbasis Budaya*, 1–7. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Ulwan, A. N. (1993). *Pendidikan Anak Menurut Islam Kaidah-kaidah Dasar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Winataputra, U. S. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan: Refleksi Historis-epistemologis dan Rekonstruksi untuk Masa Depan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Zuriah, N., & Yustianti, F. (2007). *Pendidikan Moral & Budi Pekerti dalam perspektif Perubahan: Menggagas Platform Pendidikan Budi Pekerti Secara Kontekstual dan Futuristik*. Jakarta: Bumi Aksara.